

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- : 09  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Selasa, 13 Juni 2017  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2018  
Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 39 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan);  
2. Ir. Rifky Efendi Hardijanto (Sekretaris Jenderal);  
3. Dr. Muhammad Yusuf, SH., MM. (Inspektur Jenderal);  
4. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap)  
5. DR.Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);  
6. Dr. Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);  
7. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);  
8. M. Zulficar Mochtar, ST., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan); dan  
9. Dr.Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan)  
beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2018, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp1.271.670.958.375,- atau 15,38% dari Pagu APBN Tahun 2017 setelah *Self Blocking* sebesar Rp8.269.353.843.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lebih meningkatkan serapan pada APBN Tahun 2017.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2018 sebesar Rp7.328.707.475.000,- dengan sumber dana dari:
  - a. Rupiah Murni sebesar Rp7.199.475.846.000,-;
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp92.733.287.000,-; dan
  - c. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp36.498.342.000,-dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp423.513.360.000,-;
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp73.117.458.000,-;
  - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp1.280.771.688.000,-;
  - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp944.857.746.000,-;
  - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp813.454.764.000,-;
  - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp785.003.713.000,-;
  - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp683.921.318.000,-;
  - h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.794.291.684.000,-; dan
  - i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp529.775.744.000,-.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti opini *disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menambah alokasi anggaran bantuan Alat Penangkap Ikan (API) yang ramah lingkungan sebagai pengganti kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, payang atau sejenisnya, untuk kapal penangkap ikan paling besar 10 GT.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan gerakan bersih pantai di seluruh Indonesia, mengingat kondisi di beberapa pantai tercemar limbah plastik yang dapat mempengaruhi ekosistem perairan.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

**SUSI PUDJIASTUTI**

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**VIVA YOGA MAULADI, M.Si.**  
**A-493**

1. Komisi IV DPR RI mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas serapan APBN Tahun 2017 per-tanggal 3 April 2017 sebesar Rp561.394.367.000,-

atau 6,04% dari pagu sebesar Rp9.299.904.089.000,-. Komisi IV DPR RI mendorong agar serapan anggaran ke depan dapat ditingkatkan.

2. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kapal pelaku *illegal unreproted unregulated fishing* tahun 2016 dan kapal ikan ilegal tahun 2017, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan laporan kinerja Satuan Tugas (Satgas) 115 secara berkala.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memaksimalkan fungsi dan peran dalam memoderenisasi Perum Perikanan Indonesia, PT. Perikanan Nusantara (Persero), dan PT. Garam (Persero) terutama dalam meningkatkan produksi dan menstabilkan harga ikan dan garam.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran untuk program pembekalan, pengolahan data, dan manajemen usaha bagi 2.500 Penyuluh Perikanan Bantu.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat kajian kerugian ekologis dan kerugian ekonomi terhadap dampak rusaknya terumbu karang di kawasan konservasi Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat oleh Kapal MV. Caledonian Sky, serta melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk secara tegas melakukan penegakan hukum atas kegiatan reklamasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menindak tegas perusahaan yang melanggar.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar pada setiap revisi anggaran yang tidak harus dibahas dalam Rapat Kerja, agar dilaporkan secara tertulis kepada Komisi IV DPR RI.
8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi dan mengambil langkah untuk melindungi para Anak Buah Kapal (ABK) yang bergerak di sektor perikanan di luar negeri dari tindakan pelanggaran HAM.
9. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 ke Provinsi Bangka Belitung, Banten, dan Gorontalo, terutama untuk melanjutkan program pemberian bantuan dan perbaikan prasarana dan sarana bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

